

Judul : Temuan Pansus DPR: Ujung-ujungnya Revisi UU
Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

► **TEMUAN PANSUS DPR**

Ujung-Ujungnya Revisi UU

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memperkirakan ujung dari pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terhadap komisi antirasuah itu berujung pada revisi undang-undang lembaga tersebut.

Menurut Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, hal tersebut adalah upaya untuk melemahkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Kami sudah menduga, isu revisi UU KPK akan muncul. Beberapa kali upaya untuk melemahkan KPK terbaca di draf revisi sebelumnya," katanya, Rabu (23/8).

Dia memercayai apa yang pernah disampaikan presiden. Presiden tegas tidak akan merevisi UU KPK saat ini dan tetap akan memperkuat lembaga independen tersebut.

Penegasan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat peran KPK kembali disampaikan saat menyampaikan

kan Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2017.

Dia menambahkan, jika dengan revisi kewenangan KPK untuk menuntut dicabut, misalnya, maka para tersangka yang sedang diproses saat ini termasuk kasus korupsi KTP berbasis elektronik tidak akan bisa diajukan ke pengadilan.

DPR memastikan akan merevisi UU No. 30/2002 tentang KPK. "Saya meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus. Sebab, revisi UU KPK itu sudah pasti, karena penyimpangannya sudah terlalu banyak," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Rabu (23/8).

Dia menilai kinerja KPK sudah seperti negara dalam negara, karena tidak memiliki ketundukan pada prosedur bernegara yang sudah baku. Baik dalam hukum acara, penegakan hukum maupun terkait hak-hak warga negara. (John A.

Oktaveri/Lingga S. Wiangga)

Isi di luar tanggung jawab percetakan PT Aksara Grafika Pratama